



BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 55 TAHUN  
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
- b. bahwa berdasarkan usul beberapa Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, yang pada prinsipnya mengajukan pergeseran anggaran untuk rincian belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 dikarenakan kondisi tertentu yang tidak menyebabkan perubahan postur anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/603/KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5,



- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 30);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);
  33. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
  34. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);
  35. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 740/058/KESRA

tanggal 2 Februari 2022 Hal Permintaan Perubahan Kode Rekening;

2. Nota Dinas Kepala Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Barat Nomor 900/174.1/DPTKOP tanggal 3 Februari 2022 Perihal Penyampaian Pergeseran Anggaran Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Barat;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat Nomor 460/155/Dinsos/2022 Perihal Pergeseran/Perubahan Kode Rekening pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat TA. 2022;
4. Surat Camat Lahomi Nomor 900/186/KEC.LHM tanggal 4 Februari 2022 Perihal Penyampaian Pergeseran Anggaran pada APBD TA. 2022;
5. Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat Nomor 900/262/PRKPLH tanggal 4 Februari 2022 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat TA. 2022;
6. Surat Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 027/096/PBJ tanggal 4 Februari 2022 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Langsung (BLT) TA. 2022;
7. Surat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Barat Nomor 476/133/PP-KB tanggal 4 Februari 2022 Hal Usulan Pergeseran Anggaran APBD TA. 2012;
8. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Barat Nomor 523/141/DKP tanggal 4 Februari 2022 Hal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran TA. 2022;
9. Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Barat Nomor 050/183/Kesbangpol tanggal 4 Februari 2022 Hal Susulan Permohonan Pergeseran Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Barat T.A. 2022;
10. Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat Nomor 550/79/Dishub tanggal 4 Februari 2022 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 900/712/BKD tanggal 4 Februari 2022 Hal Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran pada Sub Kegiatan TA.2022;
12. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 180/104/Hk tanggal 4 Februari Hal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran T.A. 2022;
13. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 900/274/PMD tanggal 7 Februari



- 2022 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Dinas PMD Kabupaten Nias Barat;
14. Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat Nomor 556/253/Disparbud tanggal 7 Februari 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran pada APBD Tahun 2022;
  15. Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat Nomor 790/242/DPM-PTSP Perihal Permohonan Perubahan Pembebanan Target Penerimaan Asli Daerah (PAD);
  16. Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nias Barat Nomor 427/0089/Dispora tanggal 7 Februari 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran TA. 2022;
  17. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 050/257/Bappeda tanggal 8 Februari 2022 Hal Penyampaian Pergeseran Anggaran 2022;
  18. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Barat Nomor 600/246/PUPR/ 2022 tanggal 9 Februari 2022 Perihal Permohonan Status Kegiatan/Sub Kegiatan pada Aplikasi SIPD dibuka untuk Penyempurnaan, Penjabaran, dan Pergeseran;
  19. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Nomor 440/450/DINKES tanggal 9 Februari 2022 Hal Penyampaian Usulan Pergeseran Anggaran APBD TA.2022;
  20. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 900/152/Setwan tanggal 9 Februari 2022 Hal Penyampaian Pergeseran Anggaran TA.2022;
  21. Nota Dinas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat Nomor 900/182/TARSIP tanggal 9 Februari 2022 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran pada APBD TA. 2022;
  22. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor 470/471/Disdik tanggal 9 Februari 2022 Hal Permohonan Penginputan Rincian Kegiatan T.A. 2022;
  23. Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 900/10/Adpem Perihal Permohonan Penginputan Pergeseran Rincian Kegiatan T.A. 2022;
  24. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 900/763/BPKPAD tanggal 10 Februari 2022 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran;
  25. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Barat Nomor 520/135/Distanpang tanggal 10 Februari 2022 Hal Penyampaian Usulan Pergeseran Anggaran APBD TA. 2022;

26. Nota Dinas Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 415.4/69/KS tanggal 10 Februari 2022 Perihal Penyampaian Pergeseran Anggaran Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat T.A. 2022;
27. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat Nomor 900/135/Kominfo tanggal 11 Februari 2022 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran;
28. Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 027/177/BU tanggal 11 Februari 2022 Hal Pergeseran Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat TA. 2022;
29. Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 900/145/Tapem tanggal 14 Februari 2022 Hal Pergeseran Nomor Rekening Belanja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat TA. 2022;
30. Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 900/159/Ekon tanggal 14 Februari 2022 Perihal Permohonan Penginputan Pergeseran Anggaran pada APBD TA. 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Perubahan terhadap ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Bupati ini selanjutnya ditampung dan dicatatkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi  
pada tanggal 21 Februari 2022

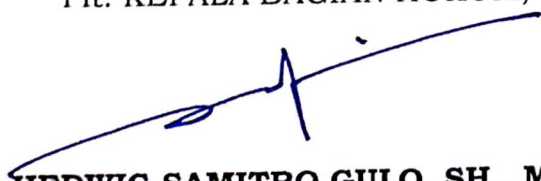
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM**  
**PENATA**  
**NIP. 19900512 201403 1 001**